

SATPOL PP KAB. LIMA PULUH KOTA
SARILAMAK
2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran. Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing masing sasaran strategis dan analisisnya.

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi %	%	Predikat
Meningkatnya Ketenramanan masyarakat dan ketertiban	Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani	60	60	100	Sangat Tinggi
	Persentase sosialisasi penyakit	100 %	100%	100	Sangat Tinggi

NO	Indikator	Target	RPJMD	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket
1.	Jumlah kasus pelanggaran penyakit Masyarakat	60	60	45	60	60	100	

meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang mempunyai 3 buah indikator

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
1. Sasaran Strategis 1

Indikator	Target	RPJMD	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket
jumlah operasi gabungan yang dilaksanakan Satpol PP	9	9	9	9	100	100	Sangat Tinggi
jumlah PPNS	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100	100	Sangat Tinggi
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100	100	Sangat Tinggi
Jumlah linmas per jumlah penduduk	25	25	37	148			Sangat Tinggi
Rasio pos kamling per jorong	63 %	44%	69				sedang
Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat							
Jumlah linmas per jumlah penduduk	25	37	148				Sangat Tinggi
Rasio pos kamling per jorong	63 %	44%	69				sedang
Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat							
Perentase kejadian gangguan ketentraman yang tertangani	0,50	0,66	100				Sangat Tinggi

No	Kasus	Jumlah	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Tuak/Miras	10	Penyitaan Barang dan Bukti surat pernyataan	Pemberantasan dengan melibatkan tokoh masyarakat, Linmas dan Perangkat Nagari, Polisi dan TNI
2	PSK	5	Pembinaan ke panli social karya wanita andam dewi solok	10 Orang
3	Warnet/ PS / siswa main di jam sekolah	45	Peringatan, ditempat, mengurus	

3 jenis Kasus Pekat Yang Tertangani Tahun 2017

a) Jumlah Kasus Pelanggaran Penyakit Masyarakat

Penyakit Masyarakat	Persentase Sosialisasi	Jumlah operasi yang dilaksanakan	Jumlah PPNs
	100 %	9	1
	100 %	9	1
	100 %	9	1

diadakan yaitu : Penyaluhan pencegahan peredaran/ Ada 4 jenis Sosialisasi / penyaluhan penyakit masyarakat b) Persentase sosialisasi penyakit masyarakat yang tertangani

Masyarakat yang tertangani sebanyak 100%. sehingga bisa dikatakan Kasus Pelanggaran Penyakit Kabupaten Solok tergantung dari kasus yang dihadapi, dikirim untuk direhabilitasi ke Pant Andam Dewi Sukarani bekerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua ataupun diselesaikan baik berupa teguran, pembinaan Satpol PP Dari 60 kasus yang tertangani pada tahun 2017 semua bisa

Lareh Sago Halaban, Kantor Bupati, Kurunji, Gunaak, di jam sekolah ada Mungka, Jalan Lintas Sumbar Riau, terutama wilayah perbatasan, Razia warnet /PS/siswa main Pangkalan Koto Baru daerah Hulu Air dan pangkalan Purwajaya dan Bukit Limbuku, rasia PSK ada di Kecamatan tuak dilakukan di kecamatan Harau dengan lokasi Taram, pemberantasan makiat dilakukan pada tahun 2017 Operasi makiat sehingga bisa dikatakan target tercapai 100% Dari target 60 menjadi terdapat 60 kasus pemberantasan

		JUMLAH	60	
	ijin pendirian warnet dan surat pernyataan. pembinaan di kantor Satpol PP an diserahkan kepada pihak sekolah			

NO	Indikator kinerja	Target	Rpjmd	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket
2.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0	0	0	1 orang	3 orang	100	
	Jumlah Limas per jumlah penduduk	308	255	25	37	100		

Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat mempunyai 5 indikator :

2. Sasaran Strategis 2

target dapat terpenuhi 100 %.

Target ditahun 2017 adalah di targetkan untuk menambah 1 (satu) orang personil Satpol PP untuk mengikuti Pelatihan PPNs di Bogor dalam realisasinya sudah dilaksanakan jadi

d) Jumlah PPNs

diadakan sebanyak 9 kali

Operasi gabungan terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP

c) Jumlah Operasi Gabungan

Akabiluru dan Kecamatan Payakumbuh.

Dan juga diadakannya sosialisasi peningkatan peran masyarakat dalam upaya dini pencegahan kejahatan dilaksanakan 3 kali yaitu kecamatan Mungka, Kecamatan warung.

diadakan sebanyak 45 kali ke sekolah, cafe dan warung Penulhan pencegahan dan penerbitan aksi premanisme langsung yang ada di warnet, warung makan dan sekolah, diadakan sebanyak 40 kali dengan menemui masyarakat ke sekolah, penulhan pencegahan praktek perjudian masyarakat langsung yang ada di warnet, warung makan dan prostitusi diadakan sebanyak 45 kali dengan menemui sekolah, Penulhan pencegahan berkembangnya praktek penggunaan Minuman keras dan narkoba diadakan di 35

b. Jumlah Limas per jumlah 10.000 penduduk
 Jumlah limas ditargetkan tahun 2017 adalah sebanyak 25 orang per 10.000 penduduk Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 368.985 jiwa () dan jumlah anggota limas Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 1.371 orang dan didapat rata rata 37 orang per 10.000 penduduk sehingga melebihi target dan anggota

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja Pasal 11 ditetapkan berdasarkan skor yaitu dari Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah APBD dan Rasio Belanja Aparatur maka skor dari kabupaten Lima Puluh Kota adalah 500 sampai 750 maka jumlah pegawainya adalah 251 sampai 350 orang sementara jumlah keseluruhan pegawai Satpol PP 112 orang yang terdiri PNS hanya sebanyak 50 orang dan dibantu dengan 5 pegawai tidak tetap dan 56 Tenaga harian lepas dan 2 orang office boy Sehingga masih banyak dibutuhkan personil di Satpol PP namun karena Tahun 2017 tidak ada penerimaan CPNS di kabupen Lima Puluh Kota mengakibatkan tidak terjadi penambahan personil Satpol PP dan PPNS sesuai dengan Permendagri diatas.

10.000 Penduduk						
Rasio pos	0	0	63	47	69	
kamling per						
lorong						
Perentase kejadian gangguan ketertaman yang tertangani	80 %	50	0,50	0,66		

- limas kabupaten lima puluh kota sampai tahun 2017 tidak akan ditambah kecuali pembahasan personil limas seperti personil limas memasuki usia senja dan harus diganti dengan usia produktif.
- c. Rasio Pos Kamling Per Jorong
Untuk rasio ideal setiap jorong ada 1 pos ronda yang terbangun namun karena keterbatasan anggaran pos ronda yang terbangun sampai tahun anggaran 2017 baru 35 unit, pada renja 2017 direncanakan terbangun 30 unit pos ronda namun karena ada pengurangan anggaran maka terjadi pengurangan unit pos ronda menjadi 15 sehingga target 63 % terbangunnya pos ronda tidak dapat dipenuhi.
- d. Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani.
Gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak aduan yang berhasil ditangani. Berdasarkan data tahun 2017 ini terdapat 15 aduan dari masyarakat sudah ditindaklanjuti keseluruhannya sebanyak 10 aduan. Secara persentase aduan ini berhasil ditangani adalah 0,66. Sedangkan target yang ditentukan di tahun 2017 adalah 0,50 sehingga melebihi target.